

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PERUSAHAAN KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst)

ABDUL JAMIL SARIFUDDIN

Abstrak

Penulisan Tesis ini dilatarbelakangi karena adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst). PT. Pembangunan Perumahan yang telah melakukan Akuisi terhadap PT. Centurion Iman Perkasa mengajukan gugatan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rumusan masalah tesis ini yaitu apa dasar pertimbangan hakim menolak keberatan PT. Pembangunan Perumahan terhadap putusan KPPU pemberitahuan akuisisi perusahaan dan bagaimana pelaksanaan akuisisi perusahaan yang memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan dua permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim menolak keberatan PT. Pembangunan Perumahan yaitu didasarkan pada pasal 28 dan pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010. Sedangkan pelaksanaan akuisisi perusahaan yang memberikan kepastian hukum yaitu menurut peneliti aturan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 masih memberikan ruang interpretasi yang luas yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari, sehingga menurut peneliti harus ada pembaharuan hukum dalam mengatur pengambilalihan atau akuisisi perusahaan yang tegas.

Kata Kunci: PT. Pembangunan Perumahan, Akuisisi, KPPU

**OBLIGATION TO NOTIFY COMPANY ACQUISITION TO THE BUSINESS
COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION**

(Decision Study No 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst)

ABDUL JAMIL SARIFUDDIN

Abstract

The background for writing this thesis was due to a decision by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court (Decision Number 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst). PT. Housing Development which has made the Acquisition of PT. Centurion Iman Perkasa filed a lawsuit due to objections to the decision of the Business Competition Supervisory Commission. The formulation of the problem in this thesis is what is the basis for the judge's consideration of rejecting PT. Housing Development against the decision of the business competition supervisory commission notifying company acquisitions and how the implementation of company acquisitions provides legal certainty. The research method used in writing this thesis is the normative juridical law research method. Based on these two problems, it can be concluded that the judge's consideration of rejecting PT. Housing Development, namely based on article 28 and article 29 of law number 5 of 1999 and government regulation number 57 of 2010. Meanwhile, the implementation of company acquisitions that provide legal certainty, namely according to researchers, the rules in law number 5 of 1999 and government regulations number 57 of 2010 still provide broad interpretation space that can lead to conflicts in the future, so according to researchers there must be legal renewal in regulating corporate takeover or acquisition.

Keywords: Housing Development, acquisition, Business Competition Supervisory Commission